

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH  
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU**

Awang Anugrah Ilahi

NPP. 31.0273

Asdaf Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Program Studi Kebijakan Publik

Email: awanganugrahilahi@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs Andi Masrich, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The researcher focuses on the implementation of the Waste Bank Program by the Environmental Department of Bengkulu City. **Purpose:** This study aims to explain and describe the implementation of the Waste Bank Program, inhibiting factors, and efforts made to overcome these inhibiting factors. **Method:** The researcher employs a qualitative descriptive research method with the Implementation theory according to Thomas R. Dye. The four aspects of this theory include implementing organization, guidelines or regulations, personnel availability, and resources. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. **Result:** The findings obtained by the author in this study are the lack of adequate facilities, infrastructure, and human resources. There is also a lack of coordination among relevant agencies and ineffective communication with the community. The low awareness of the community about the importance of waste management and the benefits of the Waste Bank program, as well as the lack of supporting infrastructure. The allocated funds are also still insufficient. **Conclusion:** The Waste Bank Program in Bengkulu City is good, but there are still obstacles and it is still not effective due to the existing obstacles in the implementation of the Waste Bank Program. Therefore, the Bengkulu City Government, especially the Environmental Department, must educate and raise awareness among the public, give special attention, and build good relationships with vendors, companies, waste distributors, and collectors so that the waste cycle can become a commodity with economic value.

**Keywords:** Implementation; Program; Waste Bank

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Peneliti berfokus pada pelaksanaan Program Bank Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan Implementasi Program Bank Sampah, faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. **Metode:** Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teori Implementasi menurut Thomas R. Dye. Adapun empat aspek dalam teori ini yang meliputi organisasi pelaksana, pedoman atau aturan, ketersediaan personil, dan sumber daya. Teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu kurangnya sarana,

prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan komunikasi yang tidak efektif dengan masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan manfaat program Bank Sampah serta kurangnya infrastruktur pendukung. Alokasi dana yang diberikan juga masih sangat kurang. **Kesimpulan:** Program Bank Sampah yang ada di kota Bengkulu sudah baik akan tetapi masih terdapat kendala dan masih belum efektif dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program Bank Sampah tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bengkulu, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, harus mengedukasi dan menyadarkan masyarakat, memberikan perhatian khusus dan membangun hubungan yang baik dengan para vendor, perusahaan, distributor sampah, dan pengepul agar siklus sampah dapat menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis.

**Kata kunci:** Implementasi; Program; Bank Sampah

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menjaga kebersihan lingkungan didalam perjalanannya merupakan hal yang sulit untuk dilaksanakan. Kesulitan tersebut disebabkan oleh sampah. Dalam proses alam, sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanyalah produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam itu berlangsung. Sampah diartikan sebagai material sisa setelah berakhirnya suatu proses yang cenderung merusak lingkungan di sekitarnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 yang dimaksud dengan sampah adalah “sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat” (UU RI No 18, 2008). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 sampah adalah “sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga” (Kurniawati, 2018). Telah lama sampah menjadi permasalahan serius di berbagai kota besar di Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya timbunan sampah di berbagai daerah. Dalam masalah timbunan sampah terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi yaitu tingkat konsumsi, tingkat pendapatan, dan kepadatan penduduk. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu menyebutkan bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi Masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang makin beragam. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan aktivitas penduduk yang berarti juga peningkatan jumlah timbunan sampah (Satmaidi et al., 2021).

Namun kondisi saat ini sampah masih saja menjadi persoalan yang sulit untuk dipecahkan di Kota Bengkulu. Menurut Kepala Bidang kebersihan dan pengawasan lingkungan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Bengkulu (2022), jumlah sampah yang terangkut setiap harinya adalah kurang lebih 600 meter kubik, dengan rincian total timbunan sampah adalah 700 meter kubik, dimana 600 meter kubik diangkut menuju ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan sisanya ditimbun, dibakar atau masih menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau sampah yang di buang oleh masyarakat di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) liar. Produksi sampah di Kota Bengkulu mencapai 400 ton perhari yang artinya bisa mencapai 146 ribu ton sampah dalam setahun (Hadi, 2022). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu terdapat 28 Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tersedia di Kota Bengkulu (BPS, 2022). Ketersediaan TPS tersebut dua kali lipat bahkan tiga kali lipat dibandingkan dengan di Kabupaten/Kota yang lain. Tingginya sampah yang ada tersebut menjadikan Kota Bengkulu dengan produksi sampah terbanyak dibandingkan kabupaten/kota yang lain yang ada di Provinsi Bengkulu. Sampah sebanyak itu tentunya berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar lingkungan dalam beraktivitas. Polusi udara yang dihasilkan dari



banyaknya sampah yang menyebabkan bau tidak sedap mengakibatkan masyarakat mengeluh dan merasa tidak nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selain mencemari udara sampah yang terus menumpuk dapat mencemari tanah dimana sampah akan mengeluarkan zat berbahaya yang membuat tumbuhan tidak dapat tumbuh.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu pada akhir tahun 2022 telah menerapkan pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat melalui lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) kelurahan (Bisri, 2023). Namun upaya itu masih saja tak mengurangi jumlah sampah produksi rumah tangga dan industri. Pemerintah pun mengajak warga untuk bersama mengaktifkan bank sampah, dan melakukan seleksi terhadap sampah yang dibuang. Yakni dengan memilah sampah melalui penerapan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) atau pencegahan dan pengurangan sampah, penggunaan kembali/daur ulang, serta penghematan energi dan pembuangan. Karena itu seluruh elemen masyarakat perlu bersama-sama mengaktifkan bank sampah sebagai upaya mengurangi persoalan sampah di Kota Bengkulu. Pada periode pertama ini, Pemerintah Kota Bengkulu menargetkan pengurangan timbulan sampah sebanyak 46.189 ton pertahun atau sebesar 30 persen pada tahun 2025 mendatang dan selanjutnya pemerintah Kota Bengkulu menargetkan 107.775 ton pertahun atau sebesar 70 persen pengurangan dari seluruh timbulan sampah pada tahun 2025 mendatang dengan harapan dapat mengurangi timbulan sampah dengan efektif (Rahim, 2023). Sejak diberlakukannya Perda Nomor 02 Tahun 2011, Pemerintah Kota Bengkulu masih dipusingkan oleh permasalahan timbulan sampah yang belum signifikan dapat dikurangi dan masih menjadi salah satu problematika yang sulit ditangani karena banyak faktor.

Dari permasalahan yang terdapat pada latar belakang sejatinya pemerintah Kota Bengkulu telah turut serta menangani permasalahan terkait pengelolaan sampah, hal tersebut diwujudkan dalam penetapan kebijakan yang termuat pada Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Bengkulu dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Perda Kota Bengkulu No 02, 2011). Dari kebijakan tersebut terbentuklah program yang secara khusus dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah yaitu melalui Program Bank Sampah. Berdasarkan uraian tersebut peneliti lebih terfokus melakukan penelitian terhadap Program Bank Sampah yang dimana program ini lebih spesifik dan dapat menjadi solusi utama dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. Dengan demikian, pentingnya penelitian ini diteliti untuk kesejahteraan masyarakat, hidup sehat, dan lingkungan yang bersih. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU”.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan Program Bank Sampah oleh Dinas Lingkungan Kota Bengkulu ini. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan dampaknya terhadap lingkungan. Minimnya pemahaman masyarakat terkait regulasi pengelolaan sampah dan kewajiban mereka untuk mematuhi aturan tersebut. Kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, seperti tempat pembuangan sampah terkendali, pusat daur ulang, dan stasiun pemilahan sampah. Ketidacukupan dana atau sumber daya untuk membangun dan memelihara infrastruktur pengelolaan sampah. Sistem pungutan sampah yang tidak terorganisir atau tidak efektif, sehingga masyarakat tidak terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. Tidak adanya insentif yang cukup untuk mendorong pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.

Keterbatasan jumlah petugas pengawas atau petugas kebersihan untuk mengawasi dan menegakkan aturan terkait pengelolaan sampah. Tidak efektifnya sistem pengawasan dan penegakan

hukum terhadap pelanggaran aturan pengelolaan sampah. Kebijakan atau regulasi yang tidak konsisten atau tidak tegas, sehingga sulit untuk memberlakukan aturan dengan efektif. Kurangnya koordinasi antara berbagai instansi terkait dalam pelaksanaan regulasi. Minimnya program edukasi dan kampanye lingkungan yang menysasar masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pengelolaan sampah. Tidak adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan literasi lingkungan di kalangan masyarakat.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi terhadap penelitian yang dijalankan. Pertama, Eliga Aizzatus Suudiyah, 2019, “Pengorganisasian Gerakan Perempuan Sadar Lingkungan melalui Program Bank Sampah di Desa Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik”. Penelitian ini bertujuan agar masyarakat sadar tentang perilaku yang telah menjadi kebiasaan mereka selama ini, mampu mengetahui dampak-dampak yang akan terjadi jika membuang sampah sembarangan, dan mengetahui kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan fasilitas umum serta memahami cara meminimalisir sampah yang ada di masyarakat. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam metodologi penelitian dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerusakan lingkungan di desa Wadeng terjadi karena beberapa faktor, faktor yang pertama yakni kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan, faktor yang kedua yakni tidak ada fasilitas umum yang berupa Tempat Pembuangan Akhir, faktor yang terakhir adalah belum ada pengelolaan mengenai sampah rumah tangga. Advokasi keijakan dilakukan karena tidak lain adalah untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat maupun di lahan kosong. Upaya yang dilakukan oleh peneliti adalah memasang rambu-rambu sebagai larangan membuang sampah secara sembarangan (Suudiyah, 2019).

Kedua, Reni Eka Putri, 2021, “Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli sampah di Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli sampah di Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan, Padang Ulak Tanding, Kabupaten, Rejang Lebong. Metode yang diterapkan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli sampah di Bank Sampah Lembak Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, pihak operator tidak melakukan penimbangan dan pencatatan di tempat pada saat melakukan pengambilan sampah, proses tersebut dilakukan ketika di gudang Bank Sampah Lembak, sehingga nasabah tidak melihat bagaimana proses penimbangan dan pencatatan tersebut, menimbulkan kecurigaan pihak nasabah dan juga apakah sampah yang diperjualbelikan adalah termasuk benda yang suci. Pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli sampah diperbolehkan karena sampah atau barang bekas masih terdapat manfaatnya setelah disucikan kembali/didaur ulang. Meskipun dalam prakteknya tidak tersaksikannya proses penimbangan, sehingga hal itu dapat menimbulkan unsur gharar (Eka Putri, 2021).

Ketiga, Nunun Nurhajati, 2022, “Implementasi Program Bank Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Mengurangi Penumpukan Sampah Di Kabupaten Tulungagung”. Penelitian ini bertujuan agar penumpukan sampah bisa dikelola melalui program bank sampah yang berbasis partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maka dapat diambil sebuah simpulan bahwa Implementasi Program Bank Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Mengurangi Penumpukan Sampah Di Kabupaten Tulungagung yang



djalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung selaku pelaksana kebijakan telah berjalan dengan baik. Dilihat dari keberhasilan progam, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkatan input dan output dan pencapaian tujuan karena bila dibandingkan dari sebelum adanya program Bank Sampah ini masyarakat terkesan acuh dengan permasalahan sampah dengan hanya menggunakan sistem kumpul buang saja, dengan adanya program ini masyarakat sedikit demi sedikit mulai membiasakan diri dalam pengelolaan sampah sesuai dengan prinsip 3R yaitu Reduce, Reuse, Recycle (Nurhajati, 2022).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi Program Bank Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, metodenya yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif juga berbeda dengan penelitian Eliga Aizzatus Suudiyah, Reni Eka Putri, dan Nunun Nurhajati. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Thomas R. Dye yang menyatakan bahwa implementasi memiliki empat dimensi, yaitu organisasi pelaksana, pedoman atau aturan, dan ketersediaan personil (Dye, 2017).

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan Implementasi Program Bank Sampah, faktor pendukung dan faktor penghambat serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam implementasi Program Bank Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

### **II. METODE**

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teori Implementasi menurut Thomas R. Dye. Adapun empat aspek dalam teori ini yang meliputi organisasi pelaksana, pedoman atau aturan, ketersediaan personil, dan sumber daya. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dimantapkan dengan triangulasi data (Simangunsong, 2016). Desain pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Adapun tiga cara teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data telah dikumpulkan, data tersebut kemudian dianalisis yang dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Implementasi Program Bank Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu**

Program Bank Sampah merupakan salah satu upaya dari kementerian lingkungan hidup yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu untuk melakukan pengelolaan lingkungan dengan menumbuhkan rasa kepedulian lingkungan pada masyarakat dan juga ada siklus ekonomi didalamnya. Oleh karena itu, pemahaman dari masyarakat terhadap program ini merupakan salah satu indikator yang penting dalam melihat implementasi program. Terutama pada program Bank Sampah yang mengutamakan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program.

### 3.1.1. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruh dalam proses implementasi kebijakan. Dalam suatu proses implementasi kebijakan membutuhkan organisasi atau badan sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut. Pihak pelaksana dalam implementasi program bank sampah adalah Pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup, dan masyarakat Kota Bengkulu. Unsur organisasi atau unsur sosial yang membantu dalam pemberdayaan dalam hal ini Program Bank Sampah Melah Nabung Sarok yang dibina langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Pemerintah dalam hal ini memberikan banyak sumbangsi terhadap masyarakat khususnya pada pembinaan-pembinaan serta adanya sosialisai ke masyarakat dan juga kepada pengurus-pengurus pengelola lingkungan hidup terkait pengelolaan sampah dengan baik sehingga dapat menghasilkan sebuah kegiatan yang bernilai ekonomis.

Peran pemerintah daerah dalam hal ini oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dibantu dengan Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan persampahan dengan baik untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat melalui pelatihan-pelatihan maupun sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Program Bank Sampah Melah Nabung Sarok memiliki beberapa program yang dilaksanakan kepada seluruh nasabah yaitu program pelayanan nasabah, menabung sampah serta program sedekah sampah. Program pelayanan nasabah merupakan program dimana bank sampah mencari sebanyak-banyaknya nasabah atau masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan. Masyarakat diharapkan melalui program ini dapat berpartisipasi sebagai nasabah di bank sampah yang ada di lingkungannya masing-masing. Dengan masuknya masyarakat sebagai nasabah di bank sampah maka masyarakat akan mendapatkan pelayanan seperti, menabung sampah dan sedekah sampah serta adanya pelayanan penerimaan sampah, atau jemput sampah di lingkungan rumah masing-masing. Berjalannya program bank sampah agar sesuai dengan visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan dengan melakukan evaluasi tahunan.

Program menabung sampah yaitu setiap nasabah di bank sampah akan mendapatkan buku tabungan bank sampah yang berfungsi sebagai buku administrasi hasil penjualan sampah dari nasabah kepada pihak bank sampah, hasil dari penjualan tersebut biasanya masyarakat tabung terlebih dahulu sehingga semakin lama akan semakin banyak tabungan masyarakat. Hasil tabungan tersebut nantinya akan diberikan kepada masyarakat dan bisa diambil setiap hari Rabu. Sedangkan pada program sedekah sampah nasabah atau masyarakat hanya memberikan sampah hasil kumpulan di lingkungan rumahnya kepada pihak bank sampah yang menjemput sampah. Biasanya sampah yang dimaksud ini adalah sampah yang tidak dapat di daur ulang seperti sampah-sampah organik atau sampah-sampah sisa rumah tangga. Jenis sampah ini biasanya tidak digunakan lagi oleh masyarakat sehingga masyarakat hanya memberikan kepada pihak bank sampah atau menyedekahkan sampah. Hasil dari sampah tersebutlah yang digunakan oleh bank sampah untuk membuat pupuk oragnik atau kompos yang kemudian nantinya akan di jual kembali kepada masyarakat sekitar atau digunakan untuk menyuburkan tanaman milik Bank Sampah Melah Nabung Sarok. Program Bank Sampah Melah Nabung Sarok dengan menjalankan program pelayanan nasabah, menabung sampah dan sedekah sampah sangat membantu masyarakat dan memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan bank sampah masing-masing. Hal ini juga dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang ikut berpartisipasi dan merespon dengan baik sebagai anggota nasabah bank sampah di lingkungannya masing-masing. Selain itu masyarakat juga mendapatkan feedback dari hasil pengumpulan sampah berupa uang.



### **3.1.2. Pedoman atau Aturan**

Untuk menetapkan suatu program tentunya diikuti dengan peraturan yang mengatur tentang program tersebut. Apabila suatu program memiliki aturan akan mempermudah dalam proses implementasi program tersebut, karena memiliki aturan sebagai dasar hukum yang jelas. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam pasal 28 menjelaskan bahwa masyarakat merupakan sebagai aktor utama dalam pengembangan pengelolaan persampahan yang tentunya harus berperan aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh pemerintah (UU RI No 18, 2008). Dari hasil pelatihan menjadikan masyarakat dan juga pengurus bank sampah dapat mengelola persampahan dengan baik. Hasilnya masyarakat dapat menjadikan sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis seperti sisa sampah organik dijadikan sebuah kompos yang dimanfaatkan menjadi pupuk tanaman atau pupuk untuk bunga-bunga di lingkungan keluarga. Selain itu, ada juga sampah yang dapat dijual ke pengepul. Dengan keuntungan Rp.100-200 per kilogram yang dimasukkan ke kas bank sampah. Oleh karena itu melalui Program Bank Sampah Melah Nabung Sarok memberikan solusi terkait penanganan sampah khususnya sampah plastik dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat agar ingin mengumpulkan sampah-sampah yang ada di lingkungan rumahnya yang kemudian nantinya akan dijual dan diangkut ke bank sampah. Selain dengan tujuan menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat juga akan mendapatkan keuntungan dari pengumpulan sampah tersebut, karena sampah-sampah yang sudah dikumpulkan akan di beli langsung oleh pihak bank sampah dan akan menghasilkan uang.

Program Bank Sampah Melah Nabung Sarok melalui bentuk pelayanan programnya berupa pelayanan terhadap nasabah, dimana pelayanan yang dimaksud yaitu bagaimana program ini mampu mendampingi masyarakat Kota Bengkulu khususnya Kelurahan Pondok Besi untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dan ikut serta dalam keanggotaan sebagai nasabah bank sampah. Selain itu program sedekah sampah dan menabung sampah juga diberikan kepada masyarakat dalam hal ini sebagai nasabah bank sampah untuk memudahkan masyarakat dalam memobilisasi sampah yang sudah mereka kumpulkan dan juga sampah yang terkumpul nantinya akan dijual dan menghasilkan uang untuk masyarakat/nasabah itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi lapangan serta beberapa data yang diperoleh Peneliti melalui dokumen-dokumen serta wawancara dengan beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Program Bank Sampah Melah Nabung Sarok terkait pembinaan usaha melalui pemasaran usaha daur ulang sampah memberikan dampak yang baik kepada masyarakat dengan adanya penghasilan dari sisa-sisa sampah yang dapat dikelola dengan baik oleh bank sampah yang dibina langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu.

### **3.1.3. Ketersediaan Personil**

Dimensi berikutnya adalah ketersediaan personil yang merupakan dimensi yang memberikan pengaruh dalam proses implementasi program. Apabila ketersediaan personil untuk mengimplementasikan suatu program tidak sesuai dengan yang diharapkan maka proses penerapan program tersebut tidak akan efisien serta efektif.

**Tabel 1.**  
**Sumber Daya Manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu**

No	Bidang / UPTD	PNS	PTT	Jumlah
1.	Sekretariat	20		20
2.	Bidang Tata Lingkungan	21		20
3.	Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3	23		23
4.	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	9		9
5.	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas	8		8
6.	UPTD Laboratorium	4		4
7.	PTT		269	269
<b>TOTAL</b>				<b>352</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah pegawai dan tenaga kontrak pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu tergolong cukup banyak dengan jumlah mencapai 70 orang. Berdasarkan pernyataan yang dilontarkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Rusman Effendy, S.STP.MM pada tanggal 11 Januari 2024, jumlah pegawai yang ada saat ini sudah memenuhi kebutuhan, beliau berpendapat bahwa jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu sebanyak 70 (tujuh puluh) orang. Jumlah pegawai yang ada saat ini termasuk cukup banyak dan sudah sesuai dengan kompetensi. Selain itu peneliti juga mendapatkan informasi serupa yang diperoleh dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Bapak Syarnubi, SE beliau menyatakan kalau untuk permasalahan jumlah pegawai atau personal di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, pegawai yang telah berstatus PNS jumlahnya sudah cukup. Dari hasil wawancara dan data pegawai diatas dapat dilihat bahwa ketersediaan personal yang dibutuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan Program Bank Sampah di Kota Bengkulu sudah cukup, namun sejauh ini kinerja yang diharapkan masih dapat dioptimalkan.

### 3.1.4. Sumber Daya

Sumber daya juga merupakan salah satu dimensi penentu keberhasilan proses implementasi program. Dalam proses implementasi program terkadang menemukan kendala. Salah satu kendala dalam proses implementasi program adalah sumber daya. Sumber daya yang kurang memadai dapat menghambat proses implementasi program. Sumber daya merupakan daya dukung yang dibutuhkan dalam proses implementasi program. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu bersama Bank Sampah Melah Nabung Sarok melakukan pembinaan terhadap lingkungan secara fisik yaitu dengan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan lingkungan hidup khususnya pengelolaan persampahan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah yang merupakan salah satu tugas pemerintah daerah mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah serta memberikan fasilitas dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu memaksimalkan segala bentuk fasilitas sarana dan prasarana baik dalam hal kualitas sarana dan prasarana serta mengoptimalkan manfaat dari sarana dan prasarana tersebut.



Kota Bengkulu dengan kepadatan penduduk yang cukup besar. Pemerintah Kelurahan Pondok Besi terus melaksanakan pencapaian- pencapaian program yang akan dilaksanakan. Salah satunya yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di bantu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan standar hidup pada era modern saat ini. Pembinaan terhadap lingkungan merupakan salah satu poin utama dalam memberdayakan masyarakat, dimana lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat sehingga pembinaan terhadap lingkungan bukan hanya kepada pembinaan sosial melainkan pembinaan lingkungan secara fisik seperti memaksimalkan sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil observasi lapangan oleh Peneliti terkait sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan di lingkungan Kelurahan Pondok Besi Kota Bengkulu sudah tersedia cukup baik seperti adanya pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di beberapa titik yang dianggap menjadi lokasi yang menghasilkan sampah banyak, serta sudah adanya tempat sampah di masing-masing lingkungan rumah warga masyarakat. Pembangunan dan pembelian sarana dan prasarana di Kota Bengkulu menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakatnya sehingga dapat memaksimalkan pengelolaan sampah dengan baik. Pemerintah sudah membangun TPS di beberapa titik yang menjadi lokasi yang dianggap banyaknya timbulan sampah. Berdasarkan tabel di atas pemerintah juga memberikan fasilitasi persampahan seperti motor sampah, mobil sampah, gerobak sampah serta berbagai fasilitas lainnya yang tentunya menjadi sarana pendukung dalam melaksanakan pengelolaan sampah melalui Program Bank Sampah Melah Nabung Sarok.

Dimensi suber daya juga mencakup anggaran atau aspek pembiayaan. Aspek pembiayaan berfungsi untuk membiayai operasional pengelolaan sampah yang dimulai dari sumber sampah/penyapuan, pengumpulan, transfer dan pengangkutan, pengelolaan dan pembuangan akhir. Selama ini dalam pengelolaan sampah perkotaan memerlukan subsidi yang cukup besar, kemudian diharapkan sistem pengelolaan sampah ini dapat memenuhi kebutuhan dana sendiri dari retribusi. Sebagaimana kegiatan lain, maka pembiayaan sistem pengelolaan persampahan di kota Bengkulu dimaksudkan untuk dapat berjalan lancarnya pengelolaan sampah. Pada Aspek Pembiayaan ini berdasarkan yang termuat di PERDA Nomor 2 tahun 2011 kota Bengkulu, pada bab iv pasal 28 dan 29 bahwa pembiayaan penanganan sampah oleh Dinas lingkungan hidup Kota Bengkulu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu. Adapun pembiayaan sampah yang di tangani kelurahan dengan pihak ketiga/LPM bersumber dari iuran masyarakat yang besarnya di sepakati bersama antara masyarakat dan LPM, Pengelolaan dana iuran masyarakat di lakukan oleh pengurus LPM dan Sebagian hasil digunakan untuk penanganan sampah dan peremajaan sarana penanganan. Pembiayaan pengeloalan sampah Kota Bengkulu bersumber dari APBD Kota Bengkulu Biaya pengelolaan sampah masih belum mencukupi, akan tetapi itu dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu tetap berusaha semaksimal mungkin dalam hal pengelolaan sampah di kota Bengkulu.

### **3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Bank Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu**

Program Bank Sampah di Kota Bengkulu juga memiliki beberapa faktor pendukung yang mendorong keberhasilannya. Faktor-faktor tersebut di antaranya komitmen politik dari pemerintah daerah dalam mendukung program Bank Sampah, seperti mengalokasikan anggaran dan mengeluarkan kebijakan yang kondusif, menjadi faktor penting untuk kelancaran program. Kerjasama antar-instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, dan aparat kelurahan, dapat memperkuat pelaksanaan program Bank Sampah di berbagai tingkatan.

Sosialisasi dan edukasi yang gencar kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan manfaat program Bank Sampah dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan dampak negatifnya terhadap lingkungan dapat mendorong partisipasi mereka dalam program Bank Sampah. Pemahaman masyarakat tentang manfaat program Bank Sampah, seperti nilai ekonomis dari sampah dan kontribusi terhadap lingkungan, dapat meningkatkan minat mereka untuk berpartisipasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam program Bank Sampah, seperti memilah sampah di rumah dan membawanya ke Bank Sampah, menjadi kunci keberhasilan program.

Di samping faktor pendukung, program Bank Sampah di Kota Bengkulu juga menghadapi beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi. Faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu yaitu paradigma masyarakat yang menganggap sampah tidak memiliki nilai. Sampah memang identik dengan barang yang tidak berguna dan tidak memiliki nilai ekonomis, pola pikir masyarakat tentang sampah itu harus diubah sehingga masyarakat dapat melihat sampah sebagai sumber daya yang menghasilkan.

#### 1. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Pengelolaan persampahan di Kota Bengkulu dipengaruhi oleh sikap mental perilaku masyarakat. Kesibukan dari masyarakat juga mempengaruhi jalannya program Bank Sampah, terlebih lagi adanya stigma di masyarakat perkotaan bahwa sampah merupakan tanggung jawab pemerintah. Masyarakat di wilayah Kota Bengkulu pada umumnya bekerja sebagai pegawai dan pedagang yang membutuhkan waktu lama dalam bekerja, sehingga mereka hanya memiliki waktu yang sangat terbatas di rumah.

#### 2. Pendanaan

Pengalokasian dana terkait kebersihan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan memang masih sangat kurang. Selain itu kerja sama yang dilakukan oleh bank sampah bersama Bank BNI juga masih sangat membutuhkan banyak bantuan terhadap pengelolaan sampah. Dimana harapan dari masyarakat bahwa kebersihan lingkungan hidup khususnya pada pengelolaan persampahan yang cukup meresahkan masyarakat dapat diatasi dan ditangani oleh pemerintah dengan baik seperti dengan salah satu program Indonesia yaitu penanganan dan pengurangan sampah dapat dilaksanakan.

### **3.3. Upaya untuk Mengatasi Hambatan pada Implementasi Program Bank Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu**

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Bank Sampah Melah Nabung Sarok di Kelurahan Pondok Besi adalah dengan melakukan sosialisasi guna menambah nasabah sehingga nasabah yang tergabung dapat di optimalkan. Demikian halnya pada sisi pendanaan, dapat dilakukan upaya dengan menjalin kerjasama dari berbagai pihak misalnya dari Bank Pemerintah (BNI), maupun swasta.



### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pengelolaan persampahan di Kota Bengkulu dipengaruhi oleh sikap mental perilaku masyarakat. Kesibukan dari masyarakat juga mempengaruhi jalannya program Bank Sampah, terlebih lagi adanya stigma di masyarakat perkotaan bahwa sampah merupakan tanggung jawab pemerintah. Masyarakat di wilayah Kota Bengkulu pada umumnya bekerja sebagai pegawai dan pedagang yang membutuhkan waktu lama dalam bekerja, sehingga mereka hanya memiliki waktu yang sangat terbatas di rumah. Pengalokasian dana terkait kebersihan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan memang masih sangat kurang. Selain itu kerja sama yang dilakukan oleh bank sampah bersama Bank BNI juga masih sangat membutuhkan banyak bantuan terhadap pengelolaan sampah. Dimana harapan dari masyarakat bahwa kebersihan lingkungan hidup khususnya pada pengelolaan persampahan yang cukup meresahkan masyarakat dapat diatasi dan ditangani oleh pemerintah dengan baik seperti dengan salah satu program Indonesia yaitu penanganan dan pengurangan sampah dapat dilaksanakan.

## IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Bank Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu sudah terlaksana dengan baik, seperti Bank Sampah Melah Nabung Sarok. Dalam pelaksanaan Program Bank Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya seperti sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung operasional program Bank Sampah. Kurangnya koordinasi antar-instansi terkait dan komunikasi yang tidak efektif dengan masyarakat dapat menghambat kelancaran program. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan manfaat program Bank Sampah serta kurangnya infrastruktur pendukung. Alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah masih sangat kurang. Upaya untuk mengatasinya adalah dengan melakukan sosialisasi guna menambah nasabah sehingga nasabah yang tergabung dapat di optimalkan. Demikian halnya pada sisi pendanaan, dapat dilakukan upaya dengan menjalin kerjasama dari berbagai pihak misalnya dari Bank Pemerintah (BNI), maupun swasta.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Bank Sampah saja sebagai model studi kasus yang dipilih yaitu Bank Sampah Melah Nabung Sarok.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Program Bank Sampah di Kota Bengkulu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bisri. (2023). *400 Ton Produksi Sampah di Kota Bengkulu Belum Efektif Ditangani*. Rri.Co.Id. [www.rri.co.id/bengkulu/daerah/390051/400-ton-produksi-sampah-di-kota-bengkulu-belum-efektif-ditangani](http://www.rri.co.id/bengkulu/daerah/390051/400-ton-produksi-sampah-di-kota-bengkulu-belum-efektif-ditangani)
- BPS. (2022). *BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS TEMPAT PEMBUANGAN*

- SAMPAH DAN KETERSEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN SAMPAH*. Bps.Go.Id. bengkulu.bps.go.id/statictable/2022/08/26/1517/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-jenis-tempat-pembuangan-sampah-dan-ketersediaan-tempat-penampungan-sampah.html
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. (2023). *RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019 – 2023*.
- Dye, T. R. (2017). Understanding public policy. *Understanding Public Policy*.
- Eka Putri, R. (2021). *TRANSAKSI JUAL BELI SAMPAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong)*. IAIN BENGKULU.
- Hadi. (2022). *Setiap Hari Sampah di Kota Bengkulu Mencapai 400 Ton*. Infoday.Id. [www.infoday.id/setiap-hari-sampah-di-kota-bengkulu-mencapai-400-ton/](http://www.infoday.id/setiap-hari-sampah-di-kota-bengkulu-mencapai-400-ton/)
- Kurniawati, F. (2018). *Implementasi Program Bank Sampah Malang Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Penerapan Bank Sampah Malang di Kelurahan Sukun)*. Universitas Brawijaya.
- Nurhajati, N. (2022). Implementasi Program Bank Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Mengurangi Penumpukan Sampah Di Kabupaten Tulungagung. *Publikauma*, 10(1), 9–18.
- Rahim, A. A. (2023). *KLHK Targetkan 30 Persen Pengurangan Sampah di Tahun 2025*. Detiknews. [news.detik.com/berita/d-6942960/klhk-targetkan-30-persen-pengurangan-sampah-di-tahun-2025](https://news.detik.com/berita/d-6942960/klhk-targetkan-30-persen-pengurangan-sampah-di-tahun-2025)
- Satmaidi, E., Barus, S. I., Saifulloh, P. P. A., & Reformas, T. (2021). Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Guna Mendukung Program Wisata Kawasan Pesisir Provinsi Bengkulu. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 1–21.
- Simangunsong, F. (2016). Metodologi Penelitian Pemerintahan. *Bandung: Alfabeta*.
- Suudiyah, E. A. (2019). Pengorganisasian Gerakan Perempuan Sadar Lingkungan melalui Program Bank Sampah Di Desa Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. *Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Perda Kota Bengkulu No 02, (2011). [bengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/10/KOTA\\_BENGKULU\\_2\\_2011.pdf](http://bengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/10/KOTA_BENGKULU_2_2011.pdf)
- UU RI No 18. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.